

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK
ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA
DAN AKIBAT HUKUMNYA
DI KOTA SEMARANG**

TESISI

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derjat S-2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

YULIES TIENA MASRIANI

B4B007232

Pembimbing

H.MULYADI,SH.MS.

YUNANTO, SH.MHum

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2009

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Perkawinan, maka seluruh rakyat Indonesia dalam hal perkawinan berlaku satu hukum yang sama dalam pengaturannya yaitu dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, lengkap dengan Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Hal ini merupakan satu langkah kemajuan dalam hukum kekeluargaan di Indonesia.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akibat dari adanya suatu perkawinan adalah adanya hubungan antara suami isteri, hubungan antara orang tua dengan anak dan harta benda. Hubungan antara orang tua dengan anak akan timbul, apabila dalam keluarga tersebut lahir seorang anak. Namun apabila dalam suatu keluarga tidak dikaruniai seorang anak, maka akan timbul suatu permasalahan, baik yang menyangkut penerusan keturunan maupun penerusan harta kekayaan.

Perkawinan mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, juga dalam hubungannya dengan memiliki keturunan

sebagai tujuan dari perkawinan. Namun demikian terkadang dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anak sebagai penerus keturunan.. Oleh karena itu, biasanya pasangan suami isteri yang tidak mempunyai keturunan setelah lama menunggu, kemudian akan berpikir untuk mengangkat seorang anak.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Manusia perlu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Karena anak sebagai generasi penerus dari orang tuanya, juga sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Anak sebagai generasi penerus tentu saja sangat diharapkan sekali keberadaannya dalam keluarga, sehingga perlu dijaga, dibina dan dilindungi, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dengan demikian hadirnya seorang anak akan sangat diharapkan dalam kehidupan berkeluarga, karena akan menambah suasana bahagia pasangan suami isteri, namun terkadang harapan untuk segera memiliki momongan itu tak kunjung tiba, kemudian setelah lama menunggu akhirnya keinginan untuk mengangkat anak sebagai jalan keluarnya.

Pengangkatan anak bukanlah masalah baru di Indonesia, karena sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan.

Menurut R. Soepomo, sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia, dalam hal adopsi atau pengangkatan anak mempunyai corak sebagai berikut :

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat;
2. Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;
3. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit;
4. Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).¹

Di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan, bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang

¹ Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm.42.

lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya “Hukum Perkawinan Adat” : Anak angkat, adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²

Pengangkatan anak dibedakan dengan pemeliharaan anak , karena pengangkatan anak menimbulkan akibat-akibat hukum tersendiri. Bila dibandingkan antara pemeliharaan anak dengan pengangkatan anak, maka yang bersifat pemeliharaan itu adalah lebih menyeluruh, walaupun pengangkatan anak terdapat di seluruh Nusantara.

Adanya anak angkat, karena seseorang diambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki-laki, mungkin pula seorang anak perempuan. Jumlah anak angkat seseorang tidak terbatas, sesuai dengan kemampuannya untuk mengangkat anak. Dapat saja ia mengangkat anak dua atau tiga orang atau lebih. Tentang umurnya tidaklah menjadi masalah, walaupun banyak daerah yang menentukan anak yang masih kecil yang akan diangkat anak. Mungkin yang masih bayi dan mungkin pula yang masih dalam kandungan. Ada bermacam-macam batas umur yang ditentukan oleh daerah-daerah, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15 atau 16. Ada yang menyebutkan asal belum dewasa, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan orang

² Hadikusuma, Hilman, **Hukum Perkawinan Adat**, (Bandung : Alumni, 1983), hlm.149.

mengangkat anak yang telah dewasa. Hal ini adalah sesuai dengan kegunaannya.³

Masyarakat Jawa Tengah mengatakan seorang anak angkat „ngangsu sumur loro“, yang artinya ia mewarisi baik dari orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya. Hal ini disebabkan karena pengangkatan anak di sini adalah pengangkatan anak orang lain, dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya, sehingga anak itu baik secara lahir maupun batin merupakan anak sendiri. Di sini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.

Mengenai kewenangan anak angkat, pada umumnya dapat dikatakan sama dengan kewenangan anak kandung. Bila dikatakan anak kandung berwenang mengurus dan mengelola serta mengerjakan harta-benda berupa sawah, ladang kebun dari orang tua, demikian pula anak angkat dapat melakukannya. Anak angkat sama seperti anak kandung, mempunyai kewenangan dalam pengurusan hari tua orang tua angkat, menjaga dan memeliharanya dalam keadaan sakit serta menyelenggarakan hari-hari terakhirnya bila meninggal.⁴

Pengangkatan anak banyak dilakukan baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, dan pada umumnya yang diangkat anak adalah saudara, akan tetapi tidak jarang juga yang diangkat anak bukan dari lingkungan keluarga sendiri, seperti anak yang terdapat di panti-panti asuhan, tempat-

³ B.Bastian Tafal, ***Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari***, (Jakarta : Rajawali, 1989), hlm.45.

⁴ Ibid, hlm.47-48.

tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat selektif.

Adapun alasan pengangkatan anak adalah banyak macamnya antara lain :

1. Untuk memelihara apabila sudah tua.
2. Agar keluarganya tidak punah.
3. Kasihan pada anak tersebut, karena yatim piatu.
4. Sebagai pancingan, yaitu adanya kepercayaan bahwa dengan mengambil anak orang lain, maka akan mendapatkan anak kandung sendiri.

Dalam kehidupan bermasyarakat, masalah adopsi atau pengangkatan anak sudah lama ada bahkan telah dilembagakan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen, terdiri dari berbagai suku dan kebudayaan, sehingga antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, mempunyai cara/ aturan/ tradisi sendiri-sendiri dalam hal pengangkatan anak.

Pengangkatan anak, hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.⁵

⁵ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Tentang **Perlindungan Anak**, (Bandung : Nuansa Aulia), hlm.29-30.

Ajaran agama Islam menganjurkan, bahwa seorang muslim wajib untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Akan tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-haknya dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah. Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi / pengangkatan anak ini disebut 'tabanni'.

Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁶

Atas dasar ketentuan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak, dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

⁶ Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 54.

Di Jawa Tengah pada umumnya dan di Kota Semarang pada khususnya, masalah pengangkatan anak mempunyai cara dan konsekuensi yang berbeda di daerah yang satu dengan daerah yang lain, sehingga seringkali menimbulkan berbagai kesulitan, seperti misalnya : Apakah anak yang akan diadopsi itu masih famili atau bukan ? Apakah anak tersebut hanya akan diasuh saja ? Apakah hanya sementara saja ikut membantu membesarkan anak tersebut hanya karena rasa iba pada lingkungan keluarganya.?

Seandainya yang dimaksud hanya untuk diasuh saja, maka berarti bahwa tidak akan terjadinya suatu pengangkatan anak dan yang perlu diperhatikan, apakah maksud yang sebenarnya dari pengasuhan itu, dan apakah anak itu akan diambil sebagai anak angkat ataukah hanya sebagai anak untuk diasuh saja.

Di dalam Hukum Adat, tidak digariskan cara-cara untuk menjadikan pengangkatan anak itu sah, yang biasa dilakukan adalah dengan membuat surat penyerahan anak dari orang tua asal kepada orang tua angkat dengan disaksikan oleh aparat setempat, sesuai dengan cara / tradisi daerah masing-masing.

Namun dalam perkembangannya setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1979 juncto No. 6 tahun 1983 untuk menambah kepastian hukum surat itu, kemudian dimohonkan pengesahan kepada Kantor Pengadilan Negeri tempat orang tua angkat.

Di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah RI No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan, bahwa Pengangkatan anak terdiri

atas : (a) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan (b) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Sedangkan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi (a) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan (b) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Pengangkatan anak ini dapat dimohonkan Penetapan Pengadilan.

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Hal ini dilakukan melalui Penetapan Pengadilan.

Anak angkat diasuh dan diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri, sehingga menimbulkan akibat hukum, yaitu anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang bagi beberapa daerah di Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia.

Pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Permohonan pengangkatan anak yang telah

memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.

Cara demikian tidaklah mutlak, dengan perkataan lain tanpa adanya surat apapun kedudukan anak angkat adalah sah, mengingat susunan masyarakat Indonesia yang heterogen ini, kemudian timbullah masalah yang berbeda dari cara pengangkatan anak sampai pada akibatnya, sehingga penulis ingin menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan akibat hukumnya di kota Semarang.

2. PERUMUSAN MASALAH

Setelah membaca latar belakang di atas, maka timbul beberapa permasalahan antara lain :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia yang terjadi di Kota Semarang ?
- b. Bagaimanakah akibat hukum pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia tersebut ?

3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun penelitian yang penulis susun ini mempunyai tujuan antara lain :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia di Kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia tersebut

4. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan mendapatkan dua macam manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat ilmiah.

a. Manfaat praktis.

Bagi pasangan suami isteri yang tidak mempunyai keturunan ataupun seseorang yang belum menikah namun telah cukup usia dan mempunyai keinginan untuk mengangkat anak, dapat memberikan wawasan dalam mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.

Bagi peneliti sendiri bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk dapat memperdalam pengetahuan tentang masalah pengangkatan anak dan akibat hukumnya.

b. Manfaat ilmiah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menghimpun informasi faktual yang berhubungan dengan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia beserta akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut.

5. KERANGKA TEORETIK

Anak merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada pasangan suami isteri sebagai pelengkap dalam kebahagiaan rumah tangganya. Di dalam diri seorang anak terkandung harapan dari orang tua untuk dapat berperan sebagai penerus keturunan dan sekaligus sebagai penerus

cita-cita agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan baik, secara fisik, mental maupun sosialnya.

Harapan pasangan suami isteri sebagai orang tua akan terwujud apabila pasangan suami isteri tersebut dikaruniai keturunan (anak). Memiliki keturunan (anak) merupakan tujuan utama bagi pasangan suami isteri untuk dapat melengkapi kebahagiaan hidup perkawinannya. Oleh karena itu, pasangan suami isteri yang telah lama menikah namun belum juga dikaruniai keturunan (anak), maka solusinya adalah dengan mengangkat anak.

Di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Selanjutnya di dalam Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Adapun motif atau alasan pengangkatan anak di Indonesia antara lain adalah :

1. karena tidak mempunyai anak.
2. Sebagai pemancing agar dapat mempunyai anak kandung.
3. Karena hanya mempunyai anak perempuan saja, maka diangkatlah anak laki-laki atau sebaliknya.
4. Karena belas kasihan, disebabkan anak tersebut tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
5. Agar si anak mendapatkan pendidikan yang layak demi masa depannya.
6. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
7. Karena merasa kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus.

Di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa Pengangkatan anak terdiri atas :

- (a) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- (b) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi :

- (a) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- (b) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan :

- (a) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat , yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak ini dapat dimohonkan Penetapan Pengadilan.
- (b) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui pengasuhan anak. Hal ini dilakukan melalui Penetapan Pengadilan.

6. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha memperoleh kejelasan dengan melakukan tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan akibat hukumnya di Kota Semarang. Juga dalam penelitian ini ingin diketahui kejelasan alasan-alasan dan syarat-syarat dari pengangkatan anak, terutama dengan adanya ketentuan yang mengatur bahwa untuk pengangkatan anak yang beragama Islam, maka pengajuan permohonan penetapannya di Pengadilan Agama, sedangkan yang beragama selain Islam, pengajuan permohonannya di Pengadilan Negeri, sehingga diharapkan dapat memberikan tanggapan yang jelas.

Hal-hal yang berkaitan dengan Metode Penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

A. METODE PENDEKATAN

Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan dengan wawancara kepada responden sebagai nara sumber yang merupakan data primer dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan.⁷

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengupayakan untuk memberikan gambaran secara konkrit, sistematis dan menyeluruh mengenai obyek penelitian dan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan juga memberikan makna dengan segala hal yang berhubungan dengan permasalahan pengangkatan anak.

C. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.⁸ Sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan obyek penelitian inilah yang dinamakan sampel.⁹

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian hanya terhadap sebagian populasi atau penelitian sampel saja, karena penelitian sampel dapat dilakukan lebih cepat dan lebih murah. Sampel itu lebih kecil dari seluruh

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm.10.

⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm.79.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm.43.

populasi, maka pengumpulan dan pengolahan data dapat dilakukan lebih cepat. Selanjutnya karena sampel hanya merupakan bagian dari populasi saja, maka biaya pengumpulan informasi menjadi lebih rendah.

Dengan memperhatikan sebagian populasi atau obyek penelitian yang merupakan suatu proses atau tahapan dengan segala prosedur pelaksanaan dari pengangkatan anak, maka sebagai sampel adalah 10 (sepuluh) Penetapan Pengadilan Agama Semarang dan 10 (sepuluh) Penetapan Pengadilan Negeri Semarang yang menetapkan tentang pengangkatan anak dengan segala akibat hukumnya. Juga Akte Kelahiran anak angkat dari Kantor Catatan Sipil Semarang.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Di dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer, adalah suatu data yang diperoleh atau didapat dengan melakukan penelitian secara langsung yaitu dengan wawancara / interview secara langsung di lapangan dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Semarang, Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Semarang yang menangani permasalahan pengangkatan anak dan akibat hukumnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah merupakan data kepustakaan yang dapat dipergunakan untuk memperoleh dasar teori sebagai data awal yang

diperlukan dalam penelitian lapangan, diambil dengan mengkaji literatur-literatur dan diktat-diktat tentang pengangkatan anak, selain itu peraturan-peraturan yang memuat tentang pengangkatan anak, antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1980 tentang Peradilan Agama.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

E. METODE PENYAJIAN DATA

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, baik yang berupa Penetapan Pengadilan Agama Semarang, Penetapan Pengadilan Negeri

Semarang maupun hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera yang menangani kasus Pengangkatan Anak, maka disusun secara teratur. Penyajian data disajikan dalam bentuk uraian yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada tentang pengangkatan anak. Hal ini dimaksudkan supaya data yang telah diperoleh lebih mudah dipahami dan dimengerti, sehingga dapat membantu dalam proses analisa.

F. METODE ANALISIS DATA

Analisis data yang akan dipergunakan normatif kualitatif yaitu analisis data hasil penelitian dengan memberikan makna dan interpretasi berdasarkan sumber-sumber ilmu hukum. Data yang telah terkumpul, baik yang berupa data primer maupun data sekunder, akan diteliti dan dipelajari lebih lanjut. Kemudian data tersebut akan dibandingkan dengan uraian yang didapat dalam studi kepustakaan, sehingga dari analisis tersebut diharapkan dapat diketahui mengenai permasalahan yang diangkat.

7.SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman dari permasalahan yang dibahas secara keseluruhan dalam Tesis ini, maka secara garis besar diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan dengan secara berurutan yakni dari beberapa bab, dimana tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab.

Adapun sistematika penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan dikemukakan tentang :

1. Latar Belakang
2. Perumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Kerangka Teoretik
6. Metode Penelitian
7. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai hal-hal yang erat hubungannya dengan judul Tesis, serta teori-teori dari para sarjana yang dapat mendukungnya. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Pengangkatan Anak
2. Tujuan Pengangkatan Anak
3. Jenis Pengangkatan Anak
4. Syarat-syarat Pengangkatan Anak
5. Tata Cara Pengangkatan Anak
6. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dikemukakan hasil penelitian dan pembahasannya yang didasarkan pada Penetapan Pengadilan Agama Semarang

dan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang serta wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan juga pegawai di Kantor Catatan Sipil Semarang tentang :

1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak
2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab penutup ini diuraikan tentang :

1. Kesimpulan
2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. PENGERTIAN PENGANGKATAN ANAK

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi pasangan suami isteri sebagai pelengkap dalam kebahagiaan rumah tangga mereka.. Di dalam diri seorang anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sesuai dengan haknya.

Seorang anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis demi kelangsungan eksistensi suatu bangsa, maka perlu memperoleh kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Hal ini dapat terlaksana apabila pasangan suami isteri tersebut memiliki keturunan (anak). Dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan jika tidak ada seorang anakpun, maka selesailah riwayat untuk lingkungan keluarga tersebut, karena mempunyai keturunan (anak) sebagai tujuan pertama dari suatu perkawinan. Bagi suami isteri yang telah lama menikah namun tidak dikaruniai keturunan, maka jalan yang ditempuh adalah dengan mengangkat anak.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 angka 1 disebutkan Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab

atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 nya disebutkan Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh pasangan suami isteri untuk dijadikan anak kandungnya sendiri. Pengangkatan tersebut sesuai dengan hukum adat setempat dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dan memelihara harta kekayaan orang tua yang mengangkatnya. Sedangkan pengertian orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Selanjutnya di dalam Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan anak dinyatakan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Muderis Zaini, dalam bukunya “Adopsi” menyebutkan bahwa Mahmud Syaltut, membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu :

Pertama, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia seorang anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Kedua, yakni yang dipahamkan dari perkataan ‘tabanni’ (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia, Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak¹⁰

¹⁰ Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm.5-6.

Dari pendapat Mahmud Syaltut tersebut di atas dapat diketahui bahwa pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Masih berkaitan dengan hal tersebut, Surojo Wignjodipuro dalam bukunya "Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat", memberikan batasan sebagai berikut : "Adopsi (mengangkat anak), adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut, timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri".¹¹

Di dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak disebutkan, bahwa dalam pengangkatan anak yang bersifat "intercountry" tersebut, maka sesuai dengan "European Convention on the Adoption of Children", yang antara lain menyatakan bahwa pengangkatan hanya sah sifatnya, apabila diberikan oleh badan peradilan melalui penetapan atau keputusan Pengadilan, yang merupakan syarat essentieel bagi sahnya pengesahan anak.¹²

Adanya anak angkat, ialah karena seseorang diambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki-laki, mungkin pula seorang anak perempuan. Jumlah anak angkat seseorang tidak terbatas, sesuai dengan kemampuannya untuk

¹¹ Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.5.

¹² Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm.19.

mengangkat anak. Dapat saja ia mengangkat anak dua atau tiga orang atau lebih. Tentang umurnya tidaklah menjadi masalah, walaupun banyak daerah yang menentukan anak yang masih kecil yang akan diangkat anak. Mungkin yang masih bayi dan mungkin pula yang masih dalam kandungan. Ada bermacam-macam batas umur yang ditentukan oleh daerah-daerah, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15 atau 16. Ada yang menyebutkan asal belum dewasa, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan orang mengangkat anak yang telah dewasa. Hal ini adalah sesuai dengan kegunaannya.¹³

Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya (gezinslid), akan tetapi ia tidak berkedudukan anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.¹⁴

Adanya suatu kebijaksanaan-kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang dapat menciptakan suasana serasi dan selaras dalam pengangkatan anak sangat diperlukan. Karena pengangkatan anak merupakan rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kasih sayang, rasa tanggung jawab dan keinginan yang tulus untuk menganggap anak angkat sebagai anaknya sendiri.

Untuk membedakan pengertian anak angkat dengan anak piaraan, anak asuh, anak terlantar, anak sah, maka penjelasannya adalah sebagai berikut :

¹³ B.Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari*, (Jakarta : Rajawali, 1989), hlm.45.

¹⁴ R.Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 1987), hlm.99.

1. Anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat supaya tumbuh menjadi dewasa, anak yang dewasanya sehat, diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya.
2. Anak piaraan adalah anak yang dipelihara oleh seseorang supaya tumbuh menjadi dewasa dan sehat.¹⁵
3. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
4. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
5. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pada hakekatnya seorang anak baru dianggap sebagai anak angkatnya, apabila orang tua yang mengangkatnya itu memandang secara “lahir dan batin” bahwa anak itu sebagai anak keturunannya sendiri.

Dalam masalah Adopsi/Pengangkatan anak di Indonesia dikenal adanya 3 (tiga) sistem hukum yaitu :

¹⁵ Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan masalahnya*, (Semarang : Dahara Prize, 1997), hlm.15.

1. Adopsi/Pengangkatan anak dalam Hukum Barat (BW)

Adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia.

Dengan demikian, karena tuntutan masyarakat walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak mengatur masalah adopsi ini, sedang adopsi itu sangatlah lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini.

Karena itulah dikeluarkan Staatsblad Nomor 129 tahun 1917, khusus Pasal 5 sampai 15 yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini untuk golongan masyarakat Tionghoa, atau yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing.¹⁶

Pasal 5 Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur tentang siapa saja yang boleh mengadopsi, yaitu ayat (1) menyebutkan bahwa seorang laki beristri atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena angkatan, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki sebagai anaknya.

Dari ketentuan di atas, maka yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami isteri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda yang tidak mempunyai anak laki-laki ataupun seorang janda yang juga

¹⁶ Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm.33.

tidak mempunyai anak laki-laki, asal saja janda yang bersangkutan tidak ditinggalkan berupa amanah, yaitu berupa surat wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak. Di sini tidak diatur secara konkrit mengenai batasan usia dan orang yang belum kawin berkawin untuk mengangkat anak.

Tata cara pengangkatan anak diatur oleh Pasal 8 sampai 10 Staatblad 1917 Nomor 129, dimana pada Pasal 8 menyebutkan empat syarat untuk pengangkatan anak, yaitu :

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak;
- 2.a. Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu; jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali;
- b. Jika anak yang akan diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta Balai Harta Peninggalan.
3. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau

ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, mak harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.¹⁷

2. Adopsi/Pengangkatan anak dalam Hukum Adat

Secara umum sistem hukum adat Indonesia berlainan dengan Hukum Barat yang individualistis liberalistis. Menurut R.Soepomo, hukum adat kita mempunyai corak sebagai berikut :

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat;
2. Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;
3. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit;
4. Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).

Dengan demikian, khusus masalah anak angkat atau adopsi bagi masyarakat Indonesia juga pastilah mempunyai sifat-sifat kebersamaan antar berbagai daerah hukum, kendatipun tentunya karakteristik masing-

¹⁷ Ibid, hlm.35-36.

masing daerah tertentu mewarnai kebhinekaan kultural suku bangsa Indonesia.¹⁸

3. Adopsi/Pengangkatan anak dalam Hukum Islam

Di dalam Hukum Islam yang bersumber dari Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah, seperti yang tercantum dalam Surat Al-Ahzab (33:4-5), dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- I. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia;
- II. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu;
- III. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak, sedang yang ada hanya kebolehan atau suruhan untuk memelihara dan pengangkatan anak. Hal ini dapat dilihat dari hasil rumusan team Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam Seminar Evaluasi Pengkajian Hukum 1980/1981 di Jakarta telah pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan untuk menyusun RUU tentang Anak Angkat yang dipandang dari sudut Hukum Islam sebagai berikut :

1. Lembaga pengangkatan anak tidak dilarang dalam Islam, bahkan agama Islam membenarkan dan menganjurkan dilakukannya pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua;

¹⁸ Ibid, hlm.42-43.

2. Ketentuan mengenai pengangkatan anak perlu diatur dengan Undang-Undang yang memadai;
3. Istilah yang dipergunakan hendaknya disatukan dalam perkataan “pengangkatan anak” dengan berusaha meniadakan istilah-istilah lain;
4. Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tuanya dan keluarga orang tua anak yang bersangkutan;
5. Hubungan keharta-bendaan antara anak angkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan untuk dalam hubungan hibah dan wasiat;
6. Dalam melanjutkan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat Hukum Adat kita mengenai pengangkatan anak hendaknya diusahakan agar tidak berlawanan dengan hukum agama;
7. Hendaknya diberikan pembatasan yang lebih ketat dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang asing;
- 8.. Pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan.¹⁹

2. TUJUAN PENGANGKATAN ANAK

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 2 disebutkan Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁹ Ibid, hlm.56-57.

Adapun tujuan pengangkatan anak di Indonesia antara lain adalah :

1. Karena tidak mempunyai anak;
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya;
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu);
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung;
6. Untuk menambah tenaga dalam keluarga;
7. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak;
8. Karena unsur kepercayaan;
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung;
10. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat;
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak;
12. Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus;

13. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan;

14. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk di adopsi (diangkat anak), dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Dalam kehidupan bermasyarakat pengangkatan anak akan lebih menjamin kesejahteraan hidup bersama, seperti dapat membantu mengurangi anak-anak terlantar, membantu usaha badan-badan panti asuhan dan mengurangi jumlah gelandangan.

Perbuatan pengangkatan anak ini banyak dilakukan oleh kalangan keluarga Indonesia, terutama keluarga yang belum mempunyai anak atau yang memang tidak dapat menurunkan keturunan sendiri. Namun demikian tidak menutup kemungkinan keluarga tersebut memang sudah ada anak tetapi ada alasan lain untuk mengambil anak, misalnya karena ingin mempunyai anak jenis kelamin yang diinginkan. Anak yang diambil dapat berasal dari keluarga lain yang sama sekali tidak ada hubungan kekeluargaan atau dari kalangan keluarga atau famili itu sendiri.

3. JENIS PENGANGKATAN ANAK

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 7 disebutkan Jenis Pengangkatan Anak terdiri atas :

a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan

- b. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, meliputi :

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan ini dapat dimohonkan Penetapan Pengadilan.

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan ini dilakukan melalui Penetapan Pengadilan.

Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengangkatan anak secara langsung” adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung.

Sedangkan yang dimaksud dengan “pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak” adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

Menurut Soerjono Soekanto, dikenal 2 (dua) macam pengangkatan anak (adopsi), yaitu :

1. Adopsi Umum mencakup :
 - a. Adopsi yang sifatnya terang dan tunai
 - b. Adopsi yang sifatnya terang saja
 - c. Adopsi yang sifatnya tunai saja
 - d. adopsi yang sifatnya tidak terang dan tidak tunai
2. Adopsi Khusus, antara lain mencakup :
 - a. Mengangkat orang luar menjadi warga suatu clan
 - b. Mengangkat anak tiri menjadi anak kandung
 - c. Pengangkatan derajat anak.²⁰

4. SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK

Pada garis besarnya permohonan pengesahan/pengangkatan anak dapat dibedakan antara :

- a. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar WNI.
- b. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI (Intercountry Adoption).
- c. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA (Intercountry Adoption).²¹

²⁰ Soerjono, Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung : Alumni, 1980), hlm.53.

²¹ Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm.33.

Dalam mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan secara lisan / tertulis kepada Ketua Pengadilan, dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri/kuasanya, dibubuhi meterai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat.
2. Isi surat permohonan, diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut, yaitu untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan di masa depannya.

Syarat-syarat Pengangkatan Anak adalah antara lain :

- a. Anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak tersebut merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2)

PP No.54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah :

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan

- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 12 disebutkan Syarat anak yang akan diangkat, meliputi :

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.

Adapun usia anak angkat adalah meliputi :

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, seperti anak korban bencana, anak pengungsian, dan sebagainya demi kepentingan terbaik bagi anak dan
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus, adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban

penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran..

Dalam mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan secara lisan / tertulis kepada Ketua Pengadilan, dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri/kuasanya, dibubuhi meterai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan N yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat.
2. Isi surat permohonan, diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut, yaitu untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan di masa depannya.

Adapun syarat-syarat bagi pengangkatan anak antar WNI yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut :

1. Syarat bagi calon orang tua angkat (pemohon)
 - a. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan.

- b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption) diperbolehkan.

2. Syarat bagi calon anak yang diangkat

- a. Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak.
- b. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Adapun persyaratan bagi calon orang tua angkat yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;

- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial (Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007)

Selain pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua lengkap dalam arti pasangan suami isteri, maka pengangkatan anak dapat pula dilakukan oleh orang tua tunggal yaitu hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri. Pemberian izin tersebut dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “orang tua tunggal” adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.

5. TATA CARA PENGANGKATAN ANAK

Di dalam pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia diatur mengenai tata cara pengangkatan anak .yaitu bahwa pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mengenai tata cara pengangkatan anak di berbagai daerah berbeda-beda, ada pengangkatan anak yang dilakukan dengan upacara adat besar yang disaksikan oleh tua-tua adat dan ada yang diresmikan terbatas dalam lingkungan keluarga dekat atau tetangga dekat saja, dan ada pula yang hanya cukup dengan adanya pengakuan dari orang tua angkat dan nampak dalam kenyataan pergaulan rumah tangga sehari-hari.

Menurut Hukum Adat Jawa tidak ada upacara tertentu namun hanya sebatas pada acara selamatan saja, setelah adanya persetujuan antara orang tua angkat dan pihak yang menyerahkan anak tersebut dengan disaksikan oleh keluarga, tetangga dekat dari orang tua angkat dengan atau tanpa dihadiri oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Pengangkatan anak dapat dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan, namun Kepala Desa/Kelurahan tidak mengadakan pencatatan tentang adanya pengangkatan anak.

Untuk sahnya pengangkatan anak menurut hukum adat ada dua cara yaitu :

a. Umum

Terhadap cara yang umum ini, pengangkatan anak dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yakni :

1. Dilakukan secara terang dan tunai

Terang maksudnya adalah pengangkatan anak tersebut dilakukan di muka pemuka adat dan disaksikan oleh masyarakat.

Tunai maksudnya pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan pemberian barang-barang berkhasiat kepada keluarganya semula menurut hukum adat setempat. Kemudian dengan pemberian barang-barang tersebut putuslah hubungan dan ikatan dengan keluarga semula. Dan anak tersebut menjadi anggota baru dari keluarga yang mengangkatnya.

Dengan demikian pengangkatan anak ini tidak hanya urusan dari keluarga yang bersangkutan saja, tetapi juga merupakan urusan dari clan yang mengambil anak tersebut. Oleh karena itu anak yang diangkat berasal dari luar clan orang yang mengangkat.

2. Dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai

Tidak terang dan tidak tunai maksudnya adalah :

Untuk pengangkatan anak tersebut tidak diperlukan suatu cara tertentu, sehingga tidak perlu adanya campur tangan dari anggota keluarga atau Kepala Desa agar pengangkatan anak tersebut menjadi terang atau dengan pembayaran kepada keluarga asal anak yang diangkat.

Adapun perbuatan tersebut bukan berarti bahwa anak yang diangkat tanpa perbuatan terang dan tunai, dalam kehidupan sosialnya lalu tidak dianggap sama sebagai anak kandung orang tua angkatnya. Bahkan dalam masalah waris, anak tersebut mendapatkan dari orang tua kandungnya dan dari keluarga yang mengangkatnya meskipun hanya meliputi barang gono gini saja.

Dengan adanya pengangkatan anak yang terakhir ini berlaku aturan, bahwa seorang anak angkat tidak hanya dianggap sebagai anak peliharaan saja, apabila orang tua yang mengangkatnya menganggap atau memandang secara lahir batin sebagai anak kandungnya sendiri, maka anak tersebut juga disebut sebagai anak angkat.

b. Khusus

Pengangkatan anak di sini mempunyai tujuan yang bermacam-macam dan merupakan penerobosan peraturan hukum adat.

Di bawah ini akan diuraikan mengenai macam-macam cara pengangkatan anak yang khusus dan terbatas pada masalah waris saja yaitu yang terdapat di daerah-daerah :

1. Di Bali, yang disebut dengan pengangkatan anak sentana yaitu suatu pengangkatan anak yang dilakukan terhadap anak perempuan sendiri, dan dengan pengangkatan anak anak tersebut, ia memperoleh hak-hak dan kewajiban seperti halnya anak laki-laki tertua. Hal ini dilakukan berhubung di Bali yang

mendapatkan warisan hanya anak laki-laki, disamping itu juga untuk melanjutkan kedudukan sebagai kepala keluarga. Perbuatan ini dilakukan dalam keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki.

2. Di Lampung yang disebut dengan “Tambi Anak” yaitu anak perempuan dijadikan seolah-olah anak laki-laki dengan jalan kawin semendo yaitu kawin dengan laki-laki di luar kurungnya. Kemudian dengan perkawinan tersebut terselip pengangkatan anak. Akibat dari Tambi Anak tersebut, anak angkat mewaris dari mertua untuk keperluan anak dan isterinya, tetapi dalam prakteknya dengan adanya semendo tadi perempuan tetap berkuasa, meskipun dalam hukum ditentukan menantulah yang berkuasa.

Lawan dari pada Tambi Anak yaitu Tegak Tegi dimana laki-laki diambil dari anggota kurungnya. Dengan perkawinan tersebut, maka menantu menjadi anak angkat dan mewaris dari mertua untuk kepentingan anak dan isterinya.

Dengan syarat tersebut kiranya dapat mengurangi kesulitan yang timbul apabila terjadi sengketa mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak menurut hukum adat..

Apabila orang tua angkat memerlukan pengakuan yang sah, maka pengangkatan anak tersebut dapat dimohonkan pengesahannya pada Pengadilan. Pengesahan tersebut sangat penting dilakukan karena untuk

menghindari adanya persengketaan mengenai berhak atau tidaknya seorang anak angkat untuk mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya.

Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan. Dan Pengadilan akan menyampaikan Salinan Penetapan Pengangkatan Anak ke Instansi terkait. Yang dimaksud dengan “Instansi terkait” adalah Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Rangkaian tata cara pengangkatan anak diawali dari adanya penyerahan anak dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dengan disaksikan keluarga dan tetangga atau sesepuh. Untuk menambah kepastian hukum, surat penyerahan tersebut dimohonkan pengesahan ke Pengadilan setempat. Selanjutnya Akta Kelahiran anak tersebut beserta surat Penetapan Pengadilan dibawa ke Kantor Catatan Sipil untuk dapat diberi catatan pada Akte Kelahiran anak tersebut tentang nama orang tua angkatnya.

6. AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK

Dengan adanya pengesahan pengangkatan anak tersebut, mengakibatkan timbulnya suatu akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam hubungan rumah tangga orang tua angkat terhadap harta benda rumah tangga tersebut, antara lain kedudukan

anak angkat terhadap orang tua angkat, kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan, dan kedudukan orang tua angkat dalam hal perkawinan anak angkatnya.

Pengangkatan anak menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua dengan anak kandung. Yang dimaksud dengan pengertian seperti hubungan orang tua dengan anak kandung adalah adanya ikatan lahir bathin dan perlakuan yang adil antara anak kandung dengan anak angkat. Perlakuan disini meliputi kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan meliputi tentang hak warisnya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

Dengan pernyataan tersebut di atas dapat diartikan bahwa kedudukan anak angkat dan anak kandung adalah sama, kecuali dalam hal hak mewarisnya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Karena dengan mengangkat anak, maka anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat dapat menimbulkan hubungan hukum. Jadi orang tua angkat sedapat mungkin tidak membedakan status anak angkat dengan anak kandung dalam hal apa saja tanpa perkecualian, karena dengan mengangkat anak orang lain dimaksudkan agar anak angkat tersebut menjadi anak dari orang tua angkatnya. Dengan perkataan lain, kedudukan anak angkat sama/sejajar dengan anak kandung.

Akibat hukum terhadap pengangkatan anak ialah bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang bagi

beberapa daerah di Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia.²²

Pengangkatan anak terjadi karena faktor anak adalah sangat penting sebagai pusat kebahagiaan dan ketenteraman dalam keluarga. Juga pentingnya anak dalam hukum pewarisan dari suatu keluarga secara tidak langsung diakui kenyataannya, baik dalam hukum adat, hukum Islam maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ada anak angkat yang berhak mewaris dari orang tua angkat sekaligus mewaris harta kekayaan orang tua kandungnya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Hukum Kewarisan, Pasal 209 disebutkan :

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 176, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dengan adanya bagian anak angkat terhadap harta peninggalan dari orang tua angkatnya yaitu sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian, hal ini

²² Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga system Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm.21.

menunjukkan bahwa di dalam Hukum Waris Islam, seorang anak angkat tetap dihargai dengan diberi wasiat wajibah.

Sedangkan di beberapa daerah di Jawa, dikatakan bahwa anak angkat dapat mewaris dari orang tua kandungnya disamping itu ia juga mewaris dari orang tua angkatnya, sehingga orang Jawa mengatakan kalau seorang anak angkat itu “ngangsu sumur loro”. Pada dasarnya, anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya sejauh mengenai harta gono gini.

Sebagai alat bukti bahwa seorang anak itu telah sah sebagai anak angkat dapat diketahui dari Akte Kelahiran anak tersebut dimana di bagian belakang Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil tersebut terdapat tulisan nama dari orang tua angkatnya

Dengan timbulnya pewarisan sebagai akibat dari adanya pengangkatan anak, maka proses peralihan harta peninggalan orang tua angkat apabila meninggal dunia sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu masih hidup dan proses itu selanjutnya berjalan terus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak angkat berhak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, tetapi sebagai anggota rumah tangga dari orang tua angkatnya, dia berhak atas barang gono gini orang tua angkatnya.

Hal tersebut ditegaskan dalam Keputusan Mahkamah Agung tentang anak angkat yaitu Keputusan Mahkamah Agung tanggal 15 Juli 1959 dalam Reg.No.182 K/Sip/1959 menyatakan bahwa anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya tersebut. Keputusan ini pada

hakekatnya adalah hanya merupakan suatu penegasan dari Keputusan-keputusan Mahkamah Agung yang sebelumnya dan berbunyi sebagai berikut :

- a. Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewaris barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah.(Putusan tanggal 24 Mei 1958 Reg.No.82/K/Sip/1957).
- b. Menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi, harta gono gini dari orang tua angkatnya; Jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya. ((Putusan tanggal 18 Maret 1959 Reg.No.37/K/Sip/1959). Dan menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Juli 1961 Nomor 284/K/Sip/1961 menegaskan bahwa menurut hukum adat di Jawa Tengah seorang anak angkat tidak berhak atas nbarang tinggalan orang tua angkatnya, yang bukan gono gini terhadap orang tua kandung, anak angkat itu hak warisnya tidak lenyap.²³

Meskipun pada dasarnya setiap orang adalah ahli waris dari orang tua kandungnya atau orang tua angkatnya berdasarkan hukum adat yang berlaku padanya, namun demikian ada kalanya seseorang dapat kehilangan hak mewarisnya karena perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan salah yang memungkinkan hilangnya hak mewaris

²³ B.Bastian Tafal, ***Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di kemudian hari***, (Jakarta : CV.Rajawali, 1983), hlm.74.

seseorang terhadap harta warisan orang tuanya atau dari pewaris lainnya adalah antara lain :

- a. Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris.
- b. Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris.
- c. Melakukan perbuatan tidak baik, menjatuhkan nama baik pewaris atau nama kerabat pewaris karena perbuatan yang tercela.

Akan tetapi perbuatan salah yang dimaksud dapat dibatalkan apabila ternyata si pewaris atau anggota waris lainnya telah memaafkan, memberi ampunan dengan nyata dalam perkataan atau perbuatan, sebelum atau ketika warisan dilakukan pembagian.

Pada umumnya anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya hanya mengenai harta gono gini saja, sejauh itu ia mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Ia tidak berhak mewaris barang asal orang tua angkatnya kecuali ada pemberian secara sukarela. Meskipun demikian anak yang telah diangkat sebagai anak angkat orang lain, ia tetap mendapat warisan dari orang tua kandungnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Pengangkatan anak pada umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat. Kesepakatan ini dibuat karena orang tua kandung si anak merasa tidak mampu ekonominya untuk mendidik dan membesarkan serta membiayai anak tersebut, sedangkan calon orang tua angkat ini adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai momongan, sehingga akhirnya memutuskan untuk mengangkat anak.

Pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di kota Semarang, pada umumnya diawali dari adanya penyerahan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat, baik secara lisan maupun tertulis, maka setelah sepakat antara kedua pihak, dibuatlah surat penyerahan tersebut yang disaksikan keluarga dan tetangga dekat.

Selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dari pengangkatan anak tersebut, maka orang tua angkat tersebut mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk yang beragama non Islam, sedangkan yang beragama Islam pengajuan permohonannya ke Pengadilan Agama Semarang, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama, Pasal 2, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Perkara tertentu di sini termasuk perkara pengangkatan anak bagi yang beragama Islam.

Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan melalui permohonan pengesahan pengangkatan anak baik secara lisan maupun tertulis dari calon orang tua angkat yang syarat dan bentuk dari surat permohonan sifatnya volunter/bebas, demikian juga tentang isi surat permohonannya, asalkan tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 6 tahun 1983 yang diulangtegaskan dalam SEMA Nomor 4 tahun 1989.

Arti penting dari Penetapan Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama adalah antara anak angkat dengan orang tua angkat terjadi hubungan pengangkatan anak yang memberi kedudukan bagi anak angkat sebagai anak angkat yang sah. Disamping itu juga untuk lebih memperkuat kedudukan si anak dengan orang tua angkatnya serta akan lebih menjamin kepastian hukum dari pengangkatan anak tersebut, sedangkan apabila tidak dimintakan Penetapan Pengadilan, maka akan terjadi permasalahan di kemudian hari terhadap anaknya, terutama dalam hal kekuasaan orang tua kandung dan terhadap hak warisnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sucipto,SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang disebutkan bahwa di dalam pengangkatan anak yang diajukan untuk dimohonkan pengesahannya itu maksud yang utama adalah untuk kepentingan masa depan si anak. Pada dasarnya yang diangkat adalah anak saudara (anak keponakan), akan tetapi banyak juga pengangkatan anak itu

dilakukan terhadap orang lain, artinya bukan dari lingkungan keluarga. Permohonan pengesahan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami isteri, baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, baik usia balita maupun anak-anak, dapat diangkat menjadi anak sesuai dengan keinginan dari orang yang hendak mengangkat anak.²⁴

Dalam penjelasan selanjutnya, Sucipto,SH, mengatakan bahwa alasan dan tujuan pengangkatan anak ini bermacam-macam, tetapi yang terutama dan terpenting adalah :

2. untuk kepentingan anak di masa depannya.
3. rasa belas kasihan terhadap anak atau yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya.
4. karena tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaganya di hari tua.
5. adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak, maka untuk “mancing” agar bisa punya anak sendiri.
6. untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan menambah kebahagiaan keluarga.²⁵

Dalam hal permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) diperlukan syarat dan bentuk surat permohonan, antara lain :

1. Permohonan dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.

²⁴ Sucipto, Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2009.

²⁵ Sucipto, hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2009.

2. Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Di samping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seseorang, namun pemohon/calon orang tua angkat harus hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan.
3. Permohonan dibubuhi meterai secukupnya.
4. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal domisili anak yang akan diangkat.
5. Isi surat permohonan diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan pengangkatan anak tersebut.
6. Juga harus tampak bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi.

Adapun syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar WNI yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut :

1. Syarat bagi calon orang tua angkat (Pemohon)
 - a. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan.
 - b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption) diperbolehkan.
2. Syarat bagi calon anak yang diangkat.

- a. Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak.
- b. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang pada umumnya dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption).

Adapun pemeriksaan di persidangan dalam memeriksa permohonan-permohonan pengesahan pengangkatan anak antar WNI, Pengadilan Negeri mendengar langsung :

1. Calon orang tua angkat (suami istri, orang yang belum pernah menikah) sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya, juga tetangga, rekan sekerja, atau Ketua RT.
2. Orang tua yang sah/walinya yang sah/ keluarganya yang wajib merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut.
3. Badan/yayasan sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Instansi Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, kalau anak angkat tersebut warga

negara Indonesia berasal dari badan/yayasan sosial (bukan private adoption).

4. Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.

Sedangkan alat bukti yang dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim antara lain sebagai berikut :²⁶

- Bukti-bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon (calon orang tua angkat) yang dikeluarkan oleh KUA setempat, bermeterai cukup, kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah orang tua kandung anak angkat.
3. Fotocopy Akta Kelahiran/Surat Kelahiran anak angkat.
4. Berita Acara Penyerahan Anak dari orang tua kandung anak angkat kepada calon orang tua angkat, bermeterai cukup.
5. Surat Keterangan Perincianj Gaji calon orang tua angkat dari Instansi tempatnya bekerja, bermeterai cukup.
6. Fotocopy KTP calon orang tua angkat.
7. Fotocopy KTP orang tua kandung anak angkat.

- Saksi-saksi yaitu :

1. Orang tua kandung anak tersebut.
2. Tetangga calon orang tua angkat (dua orang)

Mengenai orang yang dapat mengangkat anak adalah siapa saja asal mampu baik dari faktor sosial dan ekonomi, yang artinya tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan, apakah ia pasangan suami isteri atau

²⁶ Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :155/Pdt/P/2006/PN.Smg, hlm.2-4.

janda/duda, atau bahkan yang belum menikah pun boleh mengangkat anak (Single Parent Adoption).

Dalam Hukum Adat Jawa Tengah, apabila akan melakukan pengangkatan anak tidak membedakan antara yang kaya dan miskin, sebab pengangkatan anak ini antara lain dilakukan dengan tujuan sebagai penyambung keturunan dari orang tua angkat, yang artinya apabila mereka tidak mempunyai keturunan atau mempunyai keturunan namun hanya anak laki-laki atau perempuan saja, barulah mereka mengangkat anak. Dan apabila mereka mempunyai banyak anak tidak diperbolehkan untuk mengangkat anak, karena dikhawatirkan anak yang telah diangkat tersebut akan menjadi terlantar.

Pada mulanya pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak dikaruniai seorang anak, disamping itu juga untuk mempertahankan keutuhan dari suatu perkawinan. Namun demikian dengan adanya perkembangan masyarakat yang semakin maju, maka berkembang pula motivasi dari pengangkatan anak.

Seperti diketahui bahwa pada umumnya di lingkungan masyarakat kita, pengangkatan anak dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang nantinya akan melanjutkan kehidupan rumah tangga orang tua angkat.

Dari hasil penelitian diperoleh data permohonan pengesahan pengangkatan anak di kota Semarang yaitu di Pengadilan Negeri Semarang selama tahun 2006-2007 yang diambil sebanyak 10 (sepuluh) orang..

Dari 10 (sepuluh) permohonan tersebut sebanyak 8 orang (80%) menyatakan bahwa alasan mengangkat anak karena sudah lama menikah tapi belum diberikan keturunan/anak dan untuk kepentingan anak di masa depannya. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel prosentase sebagai berikut :

Tabel 1
Alasan Pengangkatan Anak di Kota Semarang
Tahun 2006 – 2007

No.	Alasan	Jumlah	%
1.	Tidak mempunyai keturunan (anak) dan untuk kepentingan anak di masa depannya	8	80
2	Untuk “mancing” agar bisa punya anak sendiri	2	20

Sumber : Buku Register di Pengadilan Negeri Semarang

Dari Tabel 1 tampak bahwa sebanyak 8 orang (80 %) alasan pengangkatan anak adalah karena tidak mempunyai keturunan (anak) dan untuk kepentingan anak di masa depannya. Karena dengan tidak mempunyai anak, maka dikhawatirkan dalam perkawinannya akan terjadi keretakan dalam rumah tangga.

Di samping itu dengan mengangkat anak diharapkan nantinya akan mendapatkan anak kandung sendiri atau untuk “mancing” agar bisa punya keturunan (anak) sendiri, yaitu sebanyak 2 (dua) orang atau sebesar 20 %.

Selain sebagai pancingan juga diharapkan nantinya anak yang diangkat akan meneruskan harta warisan dari orang tua angkatnya apabila tidak mempunyai anak kandung.

Adapun hasil penelitian di Pengadilan Agama Semarang diperoleh data mengenai alasan melakukan pengangkatan anak selama tahun 2007 – 2008 yang diambil sebanyak 10 (sepuluh) orang adalah sebanyak 7 (tujuh) orang (70 %) menyatakan karena tidak mempunyai anak kandung. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Alasan Pengangkatan Anak di Kota Semarang
Tahun 2007 – 2008

No.	Alasan	Jumlah	%
1.	Tidak mempunyai anak kandung	7	70
2	Punya anak tetapi belum lengkap hanya anak laki-laki atau perempuan saja	2	20
3	Karena keadaan ekonomi	1	10

Sumber : Kumpulan Salinan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007

Dari Tabel 2 tampak bahwa sebanyak 7 orang (70 %) alasan pengangkatan anak adalah karena tidak mempunyai anak kandung meskipun perkawinannya telah berlangsung lama, dan dengan adanya anak angkat , maka kehidupan rumah tangganya tambah bergairah dan bersemangat lagi.

Pada urutan ke 2 sebanyak 2 (dua) orang atau sebesar 20 % dalam Tabel 2 nampak bahwa pasangan suami isteri tersebut telah mempunyai anak namun belum lengkap karena hanya mempunyai anak laki-laki saja atau anak perempuan saja, sehingga dengan mengangkat anak laki-laki atau perempuan tersebut menjadi lengkaplah keluarga tersebut. Pada urutan ke 3 hanya 1 (satu) orang atau sebesar 10 % saja yang menyatakan alasan mengangkat anak karena keadaan ekonomi maksudnya karena orang tua kandung si anak ekonominya yang kurang mencukupi untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anaknya sedangkan calon orang tua angkat ekonominya lebih kuat, sehingga lebih mampu untuk mencukupi kesejahteraan anak tersebut.

Di lingkungan masyarakat Indonesia, khususnya di kota Semarang, terdapat kebiasaan mengangkat anak dari keluarga yang masih mempunyai hubungan darah yaitu dari kemenakan sendiri. Dari hasil penelitian, diperoleh data mengenai siapa yang biasanya diangkat sebagai anak, yaitu :

Tabel 3
Subyek Yang Diangkat Sebagai Anak Angkat di Kota Semarang
Tahun 2007 – 2008

No	Subyek	Jumlah	%
1.	Kemenakan sendiri	8	80
2.	Anak orang lain /perorangan	1	10
3	Balai Kesejahteraan Sosial	1	10

Sumber : Kumpulan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Semarang tahun 2007-2008

Dalam Tabel 3 terlihat bahwa sebagian besar atau sebanyak 7 orang (70 %) anak yang diambil sebagai anak angkat karena ada hubungan keluarga yaitu sebagai kemenakan sendiri dengan alasan agar nantinya harta yang diwariskan kepada anak angkat tidak jatuh ke tangan orang lain atau yang bukan keluarganya. Selain itu demi kepentingan anak agar kesejahteraan hidup anak tersebut lebih baik.

Pada urutan ke 2 Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa subyek yang diangkat anak adalah anak orang lain/perorangan artinya calon orang tua angkat mengambil anak angkat tersebut dari keluarga lain yang tidak ada hubungan kekeluargaan. Sedangkan urutan ke 3 Tabel 3 di atas bahwa Subyek yang diangkat anak diambil dari Balai Kesejahteraan Sosial di Semarang yang mengasuh anak tersebut. Dan pengangkatan anak tersebut juga diketahui dan atas persetujuan dari orang tua si anak tersebut walaupun pengambilan anak tersebut melalui Balai Kesejahteraan Sosial.

Mengenai usia anak angkat tersebut adalah di bawah usia 16 (enam belas) tahun. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 4 yaitu :

Tabel 4
Usia Anak angkat di Kota Semarang
Tahun 2006 – 2007

No	Usia Anak	Jumlah	%
1	Sejak usia kurang dari 6 tahun	7	70
2.	Usia 6 tahun – 12 tahun	2	20
3.	Usia 12 tahun – 18 tahun	1	10

Sumber : Buku Register Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Semarang

Dalam Tabel 4 terlihat bahwa sebagian besar atau sebanyak 7 (tujuh) orang tua mengangkat anak pada usia kurang dari 6 (enam) tahun, agar antara anak angkat dengan orang tua angkat terjalin hubungan lahir bathin penuh kasih sayang seperti anak kandung, selain itu agar anak dapat tumbuh sesuai dengan yang dikehendaki.

Sedangkan nomor 2 dari Tabel 4 yaitu usia anak angkat antara 6 tahun sampai dengan 12 tahun ada 2 orang dengan alasan karena sudah mengetahui keadaan anak tersebut, baik jasmani maupun rohaninya, juga supaya lebih mudah untuk merawatnya dibandingkan dengan anak yang baru lahir.

Dan nomor 3 dari Tabel 4 yaitu anak yang diangkat berusia antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun karena anak angkat tersebut sangat membutuhkan biaya untuk pendidikannya dan calon orang tua angkat tersebut juga tidak mempunyai anak dan mampu untuk membiayainya.

Berdasarkan hasil penelitian pengangkatan anak di Pengadilan Agama Semarang dijumpai usia anak angkat sebagian besar berusia kurang dari 6

(enam) tahun yaitu sejumlah 9 orang (90 %). Hal ini dapat dilihat dari Tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5
Usia Anak angkat di Kota Semarang
Tahun 2007 – 2008

No	Usia Anak	Jumlah	%
1	Sejak usia kurang dari 6 tahun	9	90
2.	Usia 6 tahun – 12 tahun	1	10
3.	Usia 12 tahun – 18 tahun	-	-

Sumber : Kumpulan Salinan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007.

Dalam Tabel 5 di atas terlihat bahwa usia anak yang diangkat sebagian besar berusia kurang dari 6 (enam) tahun yaitu sebanyak 9 orang ((0 %), dengan alasan anak tersebut sangat membutuhkan bimbingan, kasih sayang secara lahir dan batin demi masa depan anak. Sedangkan anak usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun hanya 1 orang (10 %) saja, dan anak usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun tidak ada sama sekali.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap anak yang diambil sebagai anak angkat, maka pada umumnya diserahkan langsung oleh pasangan suami isteri sebagai orang tua kandung si anak kepada calon orang tua angkat. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6
Status Anak angkat di Kota Semarang
Tahun 2007 – 2008

No	Usia Anak	Jumlah	%
1	Anak masih punya orang tua (Ayah dan Ibu)	6	60
2	Anak yatim (tidak punya Ayah)	3	30
3.	Anak yatim piatu (tidak punya Ayah dan Ibu)	1	10

Sumber : Kumpulan Salinan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007.

Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa status anak yang diambil sebagai anak angkat adalah anak yang masih mempunyai orang tua lengkap, artinya masih punya Ayah dan Ibu, sejumlah 6 orang (60 %), sedangkan anak yatim yang diangkat anak sebanyak 3 anak (30 %) dan anak yatim piatu, karena tidak mempunyai orang tua, dan diasuh oleh neneknya sebanyak 1 orang (10 %).

Perihal jenis kelamin anak yang diambil sebagai anak angkat, dari data hasil penelitian baik permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Semarang (tahun 2006-2007) maupun di Pengadilan Agama Semarang (tahun 2007-2008) menunjukkan data hampir seimbang antara anak perempuan dan laki-laki, yaitu dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Jenis Kelamin Anak Angkat di Kota Semarang
Tahun 2007 – 2008

No	Jenis Kelamin Anak Angkat	Jumlah	%
1	Anak perempuan	6	60
2	Anak laki-laki	4	40

Sumber : Buku Register di Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2006 dan Kumpulan Salinan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007.

Pemohon pengangkatan anak atau calon orang tua angkat yang mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Semarang sebagian besar adalah pasangan suami isteri yang telah menikah, namun ada pula perempuan dewasa yang masih sendiri belum menikah yang menginginkan mengangakat anak, karena mempunyai penghasilan sendiri yang cukup. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 8 di bawah ini :

Tabel 8
Status Orang Tua Angkat di Kota Semarang
Tahun 2007 – 2008

No	Status Calon Orang Tua Angkat	Jumlah	%
1	Suami Istri	8	80
2	Perempuan yang belum menikah	2	20

Sumber : Kumpulan Salinan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Semarang tahun 2007.

Berdasarkan hasil penelitian tentang status orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Semarang, sebagian besar adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah namun belum mempunyai anak sebanyak 8 orang (80 %), dan perempuan yang belum menikah namun mempunyai penghasilan sendiri yang cukup dan mempunyai keinginan untuk mengangkat anak sebanyak 2 orang (20 %).

Kemudian, baik Hakim di Pengadilan Negeri Semarang maupun di Pengadilan Agama Semarang, mengarahkan pemeriksaan di persidangan :

1. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak (termasuk badan/yayasan sosial di mana anak tersebut berasal) ataupun pihak yang akan menerima anak angkat.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut, Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.
3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua belah pihak calon orang tua angkat tersebut.
4. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat dari kedua belah pihak orang tua tersebut.

Di dalam salah satu permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon pasangan suami isteri bernama Imam dan Hanny ke Pengadilan

Negeri Semarang dan telah memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 155/Pdt/P/2006/PN.Smg., antara lain disebutkan hal-hal sebagai berikut :

1. Duduk Perkaranya :

- Dari hasil perkawinan yang sah dilaksanakan tanggal 10 Agustus 1985 (21 tahun) lamanya belum diberikan keturunan /anak, untuk itu dengan segala ketulusan dan keikhlasan hati kami berdua saya memohonkan ijin untuk dapat mengadopsi anak dari adik kandung saya (M.Fuadi/almarhum) yang bernama Sabrina tempat/tanggal lahir : Semarang, 12 Januari 1996 lewat Ketua Pengadilan Negeri Semarang demi masa depan dan hak-haknya sebagai anak kandung;
- Perlu kami sampaikan bahwa anak tersebut sejak berumur 3 bulan telah kami asuh serta kami didik dan kami sekolahkan, serta sepenuhnya mendapatkan kasih sayang dari kami berdua baik yang menyangkut kebutuhan lahir maupun batin;

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon (Imam dan Hanny) terhadap seorang anak perempuan bernama : Sabrina lahir di Semarang pada tanggal 12 Januari 1996, anak

dari suami isteri M.Fuadi (almarhum) dan Sri Nugraheni adalah sah menurut hukum;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Bukti-bukti yang diajukan yaitu berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Imam dengan Hanny tertanggal 10 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Semarang, bukti (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.4233/TP/1996 tertanggal 2 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang atas nama Shabrina, bukti (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama M.Fuadi dengan Sri Nugraheni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Semarang Selatan tertanggal 8 September 1991, bukti (P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.474.3.167/X/2005 atas nama M.Fuadi yang telah meninggal dunia tanggal 19 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Candisari tertanggal 26 Oktober 2005, bukti (P-4);
5. Fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh SA Nugraheni tentang penyerahan anak bernama Sabrina kepada Imam dan Hanny, bukti (P-5);

Selain bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi I : Owiek, dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon bernama Hanny dan saksi adalah kakak kandung dari SA Nugraheni jadi anak yang mau diangkat adalah keponakan saksi juga;
- Bahwa anak yang mau diangkat oleh Para Pemohon bernama Sabrina dan telah diasuh oleh Para Pemohon sejak usia 3 bulan layaknya seperti anak kandung dengan penuh kasih sayang dan Para Pemohon sanggup siap untuk mendidik, merawat dan mensejahterakan anak Shabrina hingga dewasa;
- Bahwa Shabrina diserahkan kepada Para Pemohon karena orang tuanya M.Fuadi ayahnya telah meninggal dunia dan ibunya SA Nugraheni hidup sendiri dan repot karena sekolah lagi di Yogyakarta;
- Bahwa anak yang diangkat sejak dirawat oleh Para Pemohon perkembangan fisik maupun mentalnya semakin bagus dan sudah Sekolah Dasar;
- Bahwa benar Para Pemohon sudah berumah tangga kurang lebih 21 tahun belum diberi keturunan;

Saksi II : Imam, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah adik kandung dari Pemohon bernama Imam;

- Bahwa benar Para Pemohon sudah berumah tangga 21 tahun tetapi belum diberi keturunan;
- Bahwa benar Para Pemohon telah mengangkat anak bernama shabrina anak mdari adik kandung Pemohon bernama Hanny;
- Bahwa benar Shabrina telah diasuh oleh Para Pemohon sejak usia 3 bulan dan telah dirawat, dididik penuh dengan kasih sayang layaknya anak kandung;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mensejahterakan anak yang diangkat;
- Bahwa benar anak yang diangkat oleh Para pemohon anak kedua dari tiga bersaudara;

2. Pertimbangan hukumnya :

- bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut di atas, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa Para pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;
- bahwa benar dari perkawinan antara M.Fuadi dengan SA Nugraheni telah dilahirkan seorang anak perempuan, anak ke-2 yang diberi nama Shabrina, lahir di Semarang pada tanggal 12 januari 1996;
- bahwa Para Pemohon sejak perkawinannya tersebut sampai saat diajukan permohonan ini belum dikaruniai anak;
- bahwa kemudian Para Pemohon bersepakat untuk mengangkat seorang anak yaitu Shabrina anak ke-2 dari perkawinan antara M.Fuadi dengan SA Nugraheni;

- bahwa Para Pemohon sudah mengasuh anak tersebut sejak anak tersebut berusia 3 (tiga) bulan, dan telah diasuh selayaknya anak kandung sendiri, dengan penuh kasih sayang dan perhatian yang besar;
- bahwa Para Pemohon keadaan ekonominya baik sehingga dapat menjamin kesejahteraan anak tersebut hingga dewasa nanti;
- bahwa Para Pemohon berharap dengan pengangkatan anak tersebut guna untuk mendapatkan keturunan dan meneruskan generasi Para Pemohon;
- bahwa selain itu untuk lebih kuatnya kedudukan anak tersebut guna kepastian hukum, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta melihat bukti-bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dan Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan.

3. Penetapan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon (Imam dan Hanny) terhadap anak perempuan bernama : Shabrina, lahir di Semarang tanggal 12 januari 1996 anak dari suami

isteri M.Fuadi (almarhum) dengan Sri Nugraheni adalah sah menurut hukum;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.159.000,- (seratus limapuluh sembilan ribu rupiah);

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tentang permohonan pengangkatan anak tersebut di atas, dapat diketahui bahwa mulai dari duduk perkara sampai pertimbangan hukumnya dengan didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dikarenakan mereka telah lama menikah (selama 21 tahun) namun belum dikaruniai anak, sehingga akhirnya mereka bersepakat untuk mengangkat anak dari keponakannya sendiri.

Masalah-masalah Yang Timbul dari Status Anak Angkat

Anak adalah merupakan tumpuan harapan bagi orang tua di kemudian hari. Akan tetapi bagi suami isteri yang tidak dikaruniai anak, dapat mempunyai anak dengan cara lain yaitu dengan melakukan pengangkatan anak

Meskipun dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak antara pihak suami dan pihak isteri, akan tetapi dalam kenyataannya tidak semudah seperti apa yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan adanya kejadian mengenai sulitnya untuk mencapai kesepakatan dari pihak mana anak tersebut akan diangkat. Seperti lazimnya, bahwa pengangkatan anak di Jawa pada umumnya dan di Semarang pada khususnya, dilakukan terhadap kemenakannya, baik dari pihak isteri maupun pihak suami. Untuk itu

permufakatan antara suami dan iseri merupakan syarat utama yang mendukung kelangsungan keluarga di kemudian hari dari akibat pengangkatan anak.

Kadang-kadang apabila tidak terjadi kesepakatan antara suami istri dan istri dalam mengangkat anak yaitu dari pihak mana anak itu akan diangkat, maka untuk adilnya, anak yang diangkat dari orang lain yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali.

Mengenai prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat Jawa bahwa pengangkatan anak sudah sah tanpa adanya pengesahan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, bahkan tidak ada upacara tertentu yang diharuskan untuk sahnya pengangkatan anak. Biasanya hanya diadakan selamatan setelah adanya persetujuan antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat dengan atau tanpa dihadiri oleh Kepala Kelurahan, sehingga tanpa adanya pencatatan tentang anak tersebut yang dilaporkan kepadanya. Dengan demikian anak yang bersangkutan telah memperoleh status anak yang sah walaupun hanya dengan mengadakan selamatan seperti tersebut di atas. Demikian pula yang terjadi di Kelurahan-kelurahan yang berada di Kota Semarang.

Hal ini dapat menimbulkan masalah apabila di kemudian hari setelah orang tua angkatnya meninggal dunia terjadi persengketaan mengenai harta peninggalan antara anak angkat dengan janda orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia, dan janda tersebut menikah lagi, maupun jika terjadi persengketaan antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat yang telah meninggal dunia. yang mana dalam hal ini sebab-sebab tertentu anak tersebut

tidak dapat mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi, misalnya jika para saksi sudah meninggal dunia atau berpindah alamat baru yang tidak diketahui.

Menurut penjelasan dari Sucipto,SH, Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, bahwa hubungan pengangkatan anak putus karena anak angkat melakukan perbuatan tercela atau tidak sesuai dengan adat istiadat orang Jawa, misalnya durhaka terhadap orang tua angkatnya. Di dalam hukum adat Jawa, hubungan pengangkatan anak dengan orang tuanya dapat putus, namun secara hukum pemutusan hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat dianggap belum sah. Hal ini mungkin terjadi karena orang tua angkat yang pada waktu pengangkatan anak dimintakan pengesahan dari Pengadilan Negeri Semarang atau Pengadilan Agama Semarang, tetapi waktu memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat tersebut tidak dikuatkan dengan suatu penetapan pengadilan, karena menyangka bahwa dengan tata cara yang sesuai dengan hukum adatnya pemutusan itu sudah sah.²⁷

Pengangkatan anak yang dilakukan dengan disahkan oleh suatu penetapan pengadilan, pemutusannya harus dengan suatu penetapan Pengadilan pula. Hal ini akan menimbulkan persengketaan mengenai harta peninggalan orang tua angkatnya antara anak angkat yang statusnya telah dicabut secara adat dengan keluarga orang tua angkat, secara adat anak angkat tersebut sudah tidak berhak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Tetapi secara hukum anak angkat tersebut masih berhak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya karena anak angkat masih mempunyai status sebagai anak angkat yang sah.

²⁷ Sucipto, Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2009.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Catatan Sipil Semarang, diperoleh keterangan bahwa rangkaian pengesahan pengangkatan anak setelah Penetapan Pengadilan Negeri Semarang / Pengadilan Agama Semarang, maka Akte Kelahiran anak angkat tersebut harus dirubah data nama orang tuanya.

Dokumen atau persyaratan yang dibawa ke Kantor Catatan Sipil Semarang agar pengangkatan anaknya lebih memperkuat pembuktiannya adalah sebagai berikut :

1. Akte Kelahiran anak tersebut
2. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang/Pengadilan Agama Semarang

Kemudian barulah di belakang akte kelahiran anak tersebut dibuatkan tulisan/ catatan samping walaupun letaknya bukan di samping akta. Salah satu contoh Akta Kelahiran anak angkat yang telah diberi catatan samping adalah dengan tulisan sebagai berikut :

Berdasarkan Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Semarang, Nomor :0810/Pdt.P/2008/PA Smg, tanggal lima Maret duaribu delapan tentang Pengangkatan Anak (Adoptie), menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, maka anak yang bernama : “Rizky Eka” telah diangkat anak oleh suami isteri : Agus Sukardi dan Ratnawati.

Demikian catatan ini dibuat pada tanggal duapuluh tiga Oktober dua ribu delapan di Akta Kelahiran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Nomor. 3370.ALT.2008.15930 oleh saya, Doktorandus Cahyo Bin,, Magister Sains, Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang..

Dengan diberinya catatan samping/pinggir pada Akta Kelahiran anak tersebut gunanya adalah untuk pencatatan agar datanya lengkap, karena apabila Akta Kelahiran tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka data yang ada di

Kantor Catatan Sipil masih atas nama orang tua kandung belum diganti dengan nama orang tua angkatnya. Apabila Akta Kelahiran Anak belum diganti dengan nama orang tua angkatnya, maka apabila orang tua angkatnya meninggal dunia, maka anak angkat tersebut akan kesulitan kalau akan meminta pembagian warisan dari orang tua angkatnya, karena tidak tercatat sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya.

2.AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK

Akibat hukum dari pengangkatan anak, khususnya terhadap kekuasaan orang tua kandung dan hak mewaris dari anak angkat yang terjadi di Semarang, tidak terdapat perbedaan sebab pengangkatan anak yang menimbulkan akibat hukum tersebut ditentukan sesuai dengan hukum kekeluargaan yang dianut oleh masing-masing daerah, juga ditentukan oleh kebiasaan daerah setempat.

Terhadap akibat hukum dari pengangkatan anak ini, adalah sebagai berikut :

a. Terhadap Kekuasaan Orang Tua Kandung

Berkenaan dengan akibat hukum pengangkatan anak, khususnya di dalam keluarga Jawa, menurut Soepomo, adalah : “Kedudukan anak angkat adalah berbeda daripada kedudukan di daerah-daerah dimana sistem keluarga berdasarkan keturunan dari pihak lelaki, seperti di Bali misalnya, dimana perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak

angkat. Sedang di Jawa, pengangkatan anak antara anak angkat dengan orang tuanya sendiri tidak memutuskan pertalian keluarga. Anak angkat masuk ke dalam kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambil anak itu, sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunannya bapak angkat.“²⁸

Mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak terutama yang menyangkut mengenai kekuasaan orang tua kandung, khususnya yang ada di Semarang disebutkan bahwa kebanyakan pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan keluarga asalnya menjadi terputus, hal ini disebabkan karena kebanyakan yang diangkat adalah dari kalangan keluarga sendiri, yang mempunyai hubungan kekeluargaan karena keponakannya sendiri.

Sedangkan anak yang diangkat dari orang lain mengakibatkan terputusnya hubungan antara anak angkat dengan keluarga asalnya. Hal ini disebabkan karena terjadinya pengangkatan anak itu dilakukan dengan kesepakatan antara orang tua kandung dari anak tersebut dengan calon orang tua angkat pada umumnya dilakukan secara lisan.

Hal ini dimaksudkan agar setelah anak tersebut masuk ke dalam kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambil anak itu sebagai anggota rumah tangganya, maka berkedudukan seperti anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

²⁸ Muderis Zaini, Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm.48.

Ada suatu kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak itu kemudian akan mendapat keturunan sendiri. Namun ada juga bagi yang sudah mempunyai anak tapi belum lengkap, maka mengangkat anak dilakukan dengan alasan untuk menolong anak tersebut agar masa depannya terjamin atau juga untuk mempererat tali persaudaraan, tetapi anak angkat tersebut tidak dapat berkedudukan seperti anak kandung, artinya dia masih mempunyai hubungan dengan keluarga asalnya.²⁹

Dengan adanya kepercayaan dari pasangan suami isteri bahwa dengan mengangkat anak, maka mereka nantinya juga akan mempunyai anak kandung sendiri, di sini memperlihatkan bahwa pasangan suami isteri tersebut masih mempunyai harapan untuk dapat memiliki anak kandung sendiri, dan anak angkat tersebut sebagai “pancingan”nya. Dan anak angkat tersebut dianggap seperti anak kandungnya sendiri, walaupun anak angkat tersebut juga masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya.

b. Terhadap Hak Mewaris

Kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan adalah seperti yang dikemukakan oleh Soepomo, yang mengatakan bahwa : “ pengangkatan anak di Jawa tidak memutuskan hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandung, apabila yang diangkat adalah kemenakan sendiri”.³⁰

²⁹ Sucipto, hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2009.

³⁰ Soepomo, 1981, Bab-bab tentang Hukum Adat, Penerbit : Universitas, cetakan ke V, hlm.101.

Pembagian harta warisan menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah dan juga atas dasar Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 16 Maret 1959 Register No.37/K/Sip/1959 dimana dikatakan bahwa anak angkat tidak berhak mewaris barang pusaka (asal) dan barang-barang asal itu kembali kepada pewaris keturunan darah, yaitu saudara-saudara si peninggal harta.

Di daerah Jawa umumnya, di samping mewaris harta gono-gini dari orang tua angkatnya, anak angkat tersebut tetap mewaris dari orang tua kandungnya.

Sedangkan akibat hukum dari pengangkatan anak yang ada di Semarang dapat dilihat dalam Tabel 8 di bawah ini :

Tabel 9
Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Kota Semarang
Tahun 2006 – 2007

No.	Akibat Hukum	Ya	Tidak
1	Hubungan dengan keluarga asal terputus	3	7
2.	Mendapat warisan dari orang tua kandung	7	3

Sumber : Hasil wawancara dengan responden

Dari Tabel 9 terlihat bahwa sebanyak 3 (tiga) orang atau sebesar 30 % menyatakan bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak akan memutuskan hubungan dengan keluarga kandung, hal tersebut diharapkan agar orang tua kandung tidak mencampuri kewenangan orang

tua angkat dalam memelihara dan membesarkan anak angkatnya. Dan orang tua angkat akan benar-benar mengasahi dan memelihara seperti anak kandungnya sendiri.

Dari 7 (tujuh) orang atau sebesar 70 % anak angkat mendapat warisan dari orang tua kandungnya karena anak tersebut diangkat dari kalangan keluarga sendiri yang mempunyai hubungan darah, sehingga hubungan si anak dengan orang tua kandungnya tetap ada, tidak terputus. Hal ini sesuai dengan adat kebiasaan di Jawa Tengah yang mengatakan bahwa seorang anak angkat “ngangsu sumur loro” yang artinya ia mendapat warisan dari kedua orang tuanya, baik dari orang tua kandung maupun dari orang tua angkat.

Dari hasil penelitian disebutkan bahwa anak angkat memperoleh warisan sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak, khususnya yang menyangkut tentang kekuasaan orang tua kandung dan terhadap hak mewaris dari anak angkat, sebagai akibat hukum yang ditimbulkan tersebut tergantung pada kesepakatan antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat serta kebiasaan yang ada di daerah setempat.

Dengan melihat akibat hukum pengangkatan anak terhadap warisan yang diperoleh oleh anak angkat yaitu mendapat bagian dari orang tua kandungnya dan juga dari orang tua angkatnya, maka akan sangat membahagiakan anak angkat tersebut, karena anak angkat tersebut masih keponakan orang tua angkatnya.

Akibat Hukum Pengangkatan Anak :

1. Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya

Pada umumnya anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya sejauh mengenai harta gono gini. Sejauh itu ia mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Ia tidak berhak mewarisi barang asal orang tua angkatnya, kecuali kalau ada pemberian sukarela.³¹

Dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1961 No.384 K/Sip/1961 ditegaskan bahwa menurut hukum adat di Jawa Tengah seorang anak angkat tidak berhak atas barang tinggalan orang tua angkatnya yang bukan gono gini. Terhadap orang tua kandung anak angkat itu hak kewarisannya tidak lenyap.

Dari hal-hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum adat adalah sebagai anak kandung sendiri tetapi dalam hal warisannya haknya terbatas yaitu hanya berhak mewaris harta gono gini saja, jadi bukan harta yang berupa harta asal atau harta pusaka orang tua angkat. Sebab harta asal kembali kepada sanak keluarga si peninggal.

Dalam hal orang tua angkat selain mempunyai anak angkat juga mempunyai anak kandung, maka harta gono-gini dibagi sama rata antara anak kandung dengan anak angkat dan tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan atas perbandingan 1 : 1.

³¹ B.Bastian Tafal, ***Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari***, (Jakarta : Rajawali, 1989), hlm.74

2. Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua kandungunya

Pengangkatan anak di Kota Semarang, berdasarkan hasil penelitian sebagian besar tidak mengakibatkan putusya hubungan antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungunya. Hal tersebut karena sebagian besar anak yang diangkat adalah dari keluarga dekat / kemenakan sendiri.

Demikian juga dalam warisan, anak angkat tetap merupakan ahli waris dari orang tua kandungunya sendiri. Dengan demikian anak angkat di sini memperoleh air dari dua sumber, yang artinya anak angkat itu di samping memperoleh warisan dari orang tua angkat juga memperoleh warisan dari orang tua kandungunya sendiri.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 10
Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkat dan Orang Tua kandung di Kota Semarang Tahun 2007- 2008

No.	Alasan	Jml	%	Keterangan
1	Mewaris harta gono-gini saja	3	30 %	Bukan dari anggota keluarga /kemenakan.
2.	Mewaris harta gono-gini dan harta asal	7	70 %	Dari keluarga sendiri/ kemenakan
3	Tidak mewaris harta kekayaan orang tua angkat	-	-	

Sumber : Hasil wawancara dengan responden

Dari Tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa ternyata dari 10 anak angkat hanya 3 (tiga) orang atau sebesar 30% yang mewaris harta gono-gini saja. Meskipun anak angkat mewaris selaku anak, sedangkan sebagai unsur orang luar ia tidak berhak. Tetapi karena pengangkatan anak tersebut melenyapkan sifat orang luar dan menimbulkan sifat anak, maka anak angkat yang bersangkutan berhak mewaris sebagai anak. Karena dalam hal ini anak angkat tetap merupakan orang luar terhadap kerabat-kerabat ayah ibu angkatnya, yang berarti bahwa ia tidak berhak mewaris barang-barang asal (barang bawaan) ayah dan ibunya, melainkan dapat memperoleh harta yang dihasilkan selama perkawinan.

Sedangkan 7 (tujuh) orang atau sebesar 70% anak angkat mendapat harta gono-gini dan harta asal, karena anak yang diangkat adalah dari kalangan keluarga sendiri yang mempunyai hubungan darah/kemenakannya sendiri, sehingga hubungan si anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap ada dan tidak putus. Dengan keadaan seperti tersebut, maka sesuai dengan adat kebiasaan di Jawa Tengah, maka anak angkat mendapat warisan dari kedua orang tuanya, baik dari orang tua angkat maupun orang tua kandungnya.³²

Biasanya anak angkat diberi warisan semasa orang tua angkat masih hidup, hal ini disebabkan kekhawatiran dari orang tua angkat akan adanya perselisihan tentang pembagian warisan diantara ahli waris yang lain.

³² A.Muliany Hasyim, hasil wawancara pada tanggal 25 April 2008.

Menurut Hj.A.Muliany Hasyim, Hakim di Pengadilan Agama Semarang mengatakan bahwa dalam Penetapan pengangkatan anak, Hakim melakukan pertimbangan hukumnya mengenai pengangkatan anak, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak j.o. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu dimaksudkan untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandung dan keluarganya serta calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.³³

Dengan adanya penjelasan tersebut dimaksudkan agar ada kejelasan bahwa pengangkatan anak tersebut benar-benar memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan tidak menimbulkan kerugian atau kekecewaan dari masing-masing pihak, namun benar-benar telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, baik dari orang tua kandung si anak maupun orang tua angkat tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor 20 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak itu berdasarkan Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Penetapan Pengadilan Agama Semarang dalam perkara Nomor : 0029/Pdt.P/2007/PA.Smg, sebagai berikut :

³³ Hj. A.Muliany Hasyim, hasil wawancara pada tanggal 25 April 2008.

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam tentang anak angkat sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.³⁴

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan yang berkenaan pengangkatan anak sebagai berikut :
 1. Tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari baik pendidikan atau lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat;
 2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab/darah antara anak dengan orang tua asal dan keluarganya;
 3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya antara anak angkat dengan orang tua angkat kecuali dalam hal tanggung jawab dan penguasaan anak (perwalian);
 4. Anak angkat berhak mendapatkan wasiat maksimal sepertiga dari harta orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya dan

³⁴ Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0029/Pdt.P/2007/PA.Smg, hlm.8.

jika tidak ada wasiat sewaktu hidupnya dapat diberikan wasiat wajibah³⁵.

³⁵ Ibid, hlm.9

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian-uraian mengenai pengangkatan anak dan akibat hukumnya tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang terjadi di Kota Semarang, baik melalui Penetapan Pengadilan Negeri Semarang maupun Penetapan Pengadilan Agama Semarang menunjukkan bahwa alasan pengangkatan anak sebagian besar adalah karena tidak mempunyai anak; Pemohon pengangkatan anak sebagian besar adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai anak; Usia anak angkat sebagian besar berusia di bawah enam tahun dan anak tersebut dari lingkungan keluarga sendiri yang mempunyai hubungan darah / kemenakannya. Dalam kenyataannya, ada beberapa orang tua angkat yang belum mengetahui kalau dalam pelaksanaan pengangkatan anak itu tidak hanya diperlukan adanya suatu penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat saja, namun diperlukan pula adanya pengesahan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Semarang bagi pemohon yang beragama non Islam dan Penetapan Pengadilan Agama Semarang bagi pemohon yang beragama Islam. Juga diperlukan adanya perubahan data nama orang tua dari nama orang tua kandung berubah menjadi nama orang tua angkat dari Kantor Catatan Sipil Semarang.

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak, terhadap kekuasaan orang tua kandung, kebanyakan pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan keluarga asalnya menjadi terputus. Hal ini disebabkan karena kebanyakan anak yang diangkat adalah dari kalangan keluarga sendiri, sedangkan terhadap hak mewaris, di samping mewaris harta gono-gini dari orang tua angkatnya, juga mewaris dari orang tuanya sendiri.

2. SARAN

1. Dengan semakin banyaknya pengangkatan anak di berbagai daerah yang beraneka macam tata caranya dan juga karena sampai saat ini masih terdapat beraneka macam peraturan tentang pengangkatan anak, maka dipandang perlu adanya suatu unifikasi dan kodifikasi hukum nasional di bidang pengangkatan anak agar terjadi kepastian hukum.
2. Bagi pasangan suami isteri yang mengangkat anak, dipandang perlu untuk melakukan pengesahan pengangkatan anak, untuk yang beragama Islam di Pengadilan Agama Semarang sedangkan yang non Islam di Pengadilan Negeri Semarang, selanjutnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil untuk merubah data tentang nama orang tua angkatnya. Hal tersebut untuk melindungi hak-hak anak angkat di kemudian hari, khususnya dalam masalah pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Hadikusuma, Hilman, 1983, ***Hukum Perkawinan Adat***, Alumni, Bandung..
- , 1993, ***Hukum Waris Adat***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Martosedono, Amir, 1997, ***Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya***, Dahara Prize, Semarang..
- Meliala, Djaja S, 1982, ***Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia***, Tarsito, Bandung.
- Prodjodikoro, R.Wirjono, 1973, ***Pengangkatan Anak dan Azas-azas Hukum Adat***, Alumni, Bandung.
- , 1976, ***Hukum Waris di Indonesia***, Penerbit Sumur, Bandung.
- Saekan, dan Erniati Effendi, 1997, ***Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia***, Arkola, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono, 1980, ***Intisari Hukum Keluarga***, Alumni, Bandung.
- Soepomo, 1984, ***Bab-bab Tentang Hukum Adat***, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, 2004, ***Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudiyat, Imam, 1981, ***Hukum Adat, Sketsa Asas***, Liberty, Yogyakarta.
- Tafal, B.Bastian, 1989, ***Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari***, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wignjodipuro, Surojo, 1994, ***Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat***, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Woerjanto, 1979, ***Hukum Adat (Adopsi, Delict dan Tatanegara)***, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.
- , ***Hukum Adat Waris***, Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP.
- Zaini, Muderis, 2002, ***ADOPSI, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum***, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang ***Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak***, 2007, Fokus Media, Bandung.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang ***Perlindungan Anak***, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Nuansa Aulia, Bandung.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang ***Kompilasi Hukum Islam***

Undang-Undang Pokok ***Perkawinan***, 2000, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang ***Perlindungan Anak***, Citra Umbara, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang ***Kesejahteraan Anak***.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974 tentang ***Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Anak***.

Undang-Undang ***Peradilan Agama*** (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989), Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Peradilan Agama, UU RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang ***Peradilan Agama***, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

